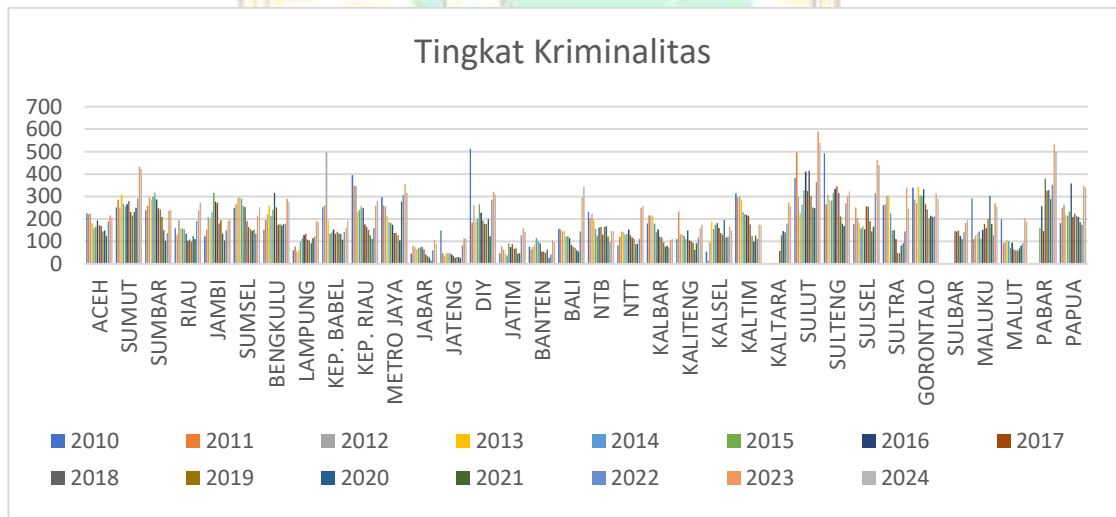


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering digunakan sebagai indikator untuk menilai stabilitas sosial dan tingkat keamanan suatu negara. Meningkatnya angka kriminalitas tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat menghambat proses pembangunan ekonomi karena menurunkan rasa aman masyarakat serta kepercayaan institusi negara. Perbedaan tingkat kriminalitas antara wilayah menunjukkan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah tidak sama. Wilayah dengan angka kejahatan yang lebih tinggi sering kali mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar, seperti angka kemiskinan yang tinggi, ketidaksetaraan pendapatan, dan kurangnya peluang kerja (Becker, 1968). Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalitas tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah 2025)

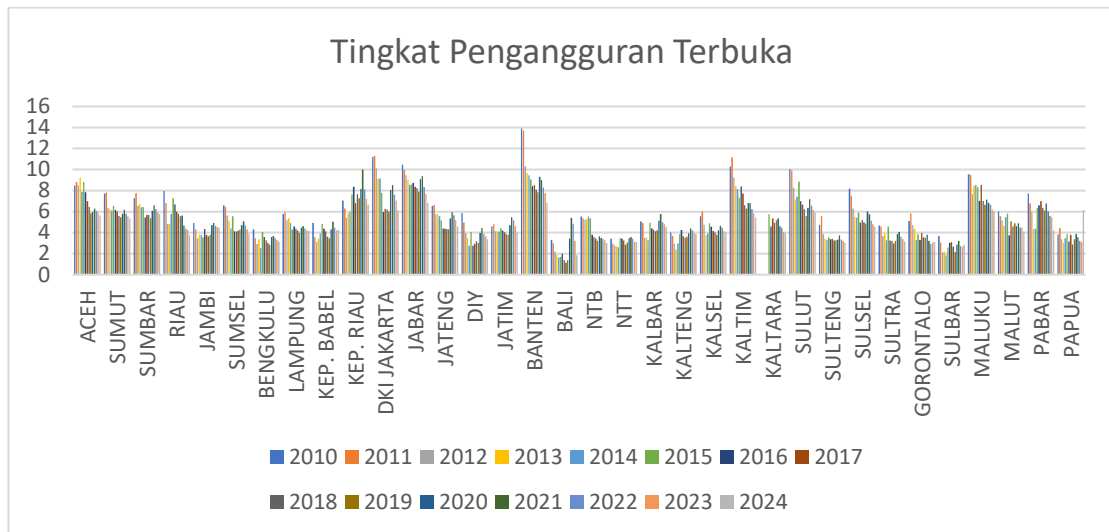
Gambar 1.1 Tingkat Kriminalitas Indonesia Tahun 2010-2024

Pada Gambar 1.1 terlihat tingkat kriminalitas di Indonesia masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan terdapat perbedaan yang cukup besar antar provinsi. Beberapa provinsi menunjukkan tingkat kriminalitas yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sumatera

Utara. Sementara itu, beberapa provinsi lainnya memiliki tingkat kriminalitas yang relatif rendah, akan tetapi tetap mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perbedaan tingkat kriminalitas antar provinsi menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi di setiap daerah tidak sama. Wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi umumnya menghadapi tekanan sosial yang cukup besar. Meskipun data penelitian mencakup berbagai provinsi, penelitian ini tidak bertujuan membandingkan provinsi satu per satu. Variasi antar provinsi dan antar waktu digunakan sebagai sumber informasi dalam data panel untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia.

Fluktuasi kriminalitas nasional dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa stabilitas sosial di Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika perekonomian regional. Pada periode tertentu, peningkatan kriminalitas diperkirakan berkaitan dengan lambatnya perekonomian, meningkatnya biaya hidup, dan melemahnya daya beli masyarakat (World Bank, 2019). Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi rumah tangga yang mendorong sebagai individu melakukan tindakan kriminal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Becker, 1968). Namun, hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung karena kriminalitas juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

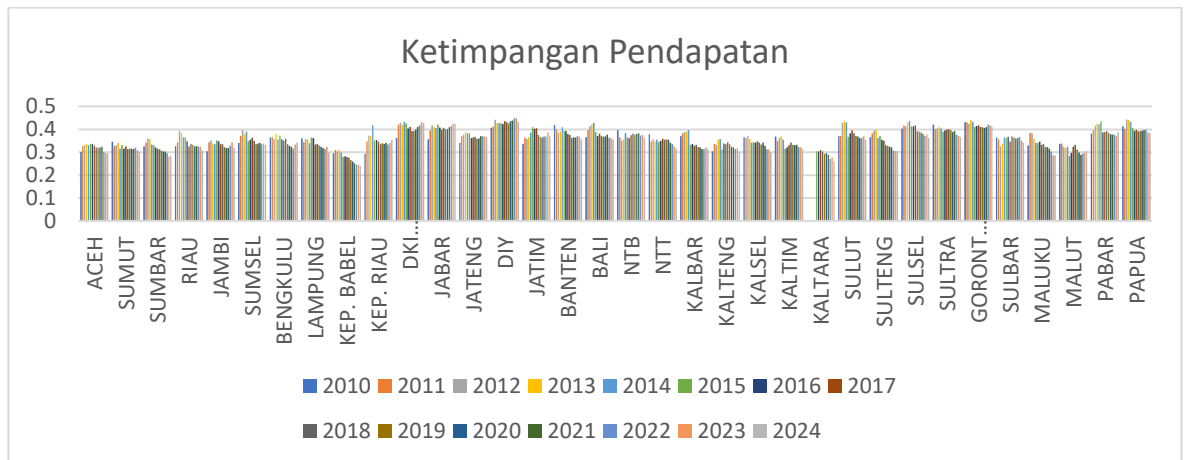
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum dan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dapat menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan, sehingga berpotensi mendorong terjadinya tindakan kriminal. Sementara itu, ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang memicu rasa tidak adil dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah 2025)

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2024

Pada Gambar 1.2 terlihat Tingkat Pengangguran Terbuka di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2010-2024, masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan terdapat perbedaan yang cukup besar antar provinsi. Provinsi seperti DKI Jakarta, Banten Jawa Barat, dan Kalimantan Timur menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain. Sementara itu, beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif lebih rendah, tetapi tetap mengalami perubahan setiap tahunnya. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di beberapa provinsi disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta masih rendahnya kerja disektor formal (Todaro & Smith, 2020). Selain itu, struktur ekonomi antar daerah yang berbeda menyebabkan kemampuan setiap provinsi dalam menyerap tenaga kerja berbeda (World Bank, 2019). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan dapat mendorong sebagian individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka sering dikaitkan dengan meningkatnya kriminalitas dalam suatu wilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah 2025)

Gambar 1. 3 Ketimpangan Pendapatan Indonesia Tahun 2010-2024

Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia pada periode 2010-2024, menunjukkan perbedaan ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan antar provinsi di Indonesia serta mengalami fluktuasi di beberapa wilayah. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Papua memiliki nilai gini ratio yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, dengan kisaran mendekati 0,50 pada beberapa tahun tertentu. Sebaliknya, provinsi seperti Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode tahun 2019-2021 terlihat tren peningkatan ketimpangan di beberapa wilayah, yang dapat dikaitkan dengan tekanan ekonomi dan lambatnya aktivitas ekonomi. Fluktuasi ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan (Todaro & Smith, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat masih belum merata dan beberapa secara spasial antar provinsi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak hanya menjadi permasalahan nasional secara agregat, tetapi juga permasalahan regional yang memiliki karakteristik berbeda-beda setiap di provinsi.

Selain faktor ekonomi, pendidikan juga diduga berperan dalam mempengaruhi tingkat kriminalitas. Pendidikan dalam penelitian ini di proksikan menggunakan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Menurut *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh Becker (1964), pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja, serta pendapatan individu. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh pendidikan terhadap kriminalitas, sehingga pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Ketimpangan Pendapatan terhadap kriminalitas dapat diestimasi secara lebih akurat.

Hubungan antara kondisi ekonomi dan kriminalitas dapat dijelaskan melalui pendekatan *economic of crime*, yang memandang bahwa individu dalam mengambil keputusan, termasuk melakukan tindakan kriminal, mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang mungkin diperoleh (Becker, 1968). Ketika peluang memperoleh pendapatan secara legal terbatas akibat tingginya kemiskinan, atau ketika distribusi pendapatan semakin tidak merata, maka sebagian individu dapat terdorong untuk memilih aktivitas ilegal sebagai alternatif. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berkaitan dengan peningkatan risiko kejahatan, terutama pada wilayah dengan tingkat hubungan sosial yang rendah (Krammer et al., 2022). Selain itu, penelitian di beberapa negara juga menunjukkan bahwa ketimpangan tetap menjadi faktor penting dalam menjelaskan variasi kriminalitas, meskipun pengaruhnya dipengaruhi oleh kualitas institusi dan kondisi sosial masing-masing negara (Pazzona, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara variabel ekonomi dan kriminalitas, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan hasil yang beragam. Seperti penelitian empiris Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan dengan variasi angkut kejahatan di berbagai daerah (Hayati, 2024). Selain itu, ketimpangan dan kemiskinan juga terjadi dengan tingkat kriminalitas antar provinsi (Sugiharti et al., 2023). Hasil penelitian tersebut memperkuat dugaan bahwa tekanan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal dalam masyarakat. Beberapa penelitian menemukan pengaruh yang signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan

bahwa hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh pendekatan, periode penelitian, dan karakteristik wilayah yang diteliti (Sugiharti et al., 2023; Pazzona, 2024)

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara simultan menguji pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas menggunakan panel data antar provinsi di Indonesia dalam periode yang lebih lama. Seperti penelitian Kurniasih et al. (2024)) menambahkan variabel lain seperti kemiskinan dan pendidikan, sedangkan Sugiharti et al. (2023) lebih memfokuskan penelitiannya pada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Serta periode dan cakupan data panelnya masih relatif pendek.

Dalam kondisi Indonesia sekarang ini, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi nasional maupun regional. Data resmi menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional masih berada di bawah lima persen (5%) dalam beberapa tahun terakhir, namun angka tersebut belum mencerminkan kondisi yang merata di 34 provinsi di Indonesia (BPS, 2025). Selain itu, Indeks Gini Indonesia yang berada pada kategori ketimpangan sedang masih menunjukkan adanya disparitas distribusi pendapatan wilayah (BPS, 2025). Perbedaan struktur ekonomi, kapasitas investasi, serta kualitas sumber daya manusia antar daerah turut mempengaruhi variasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi regional masih menjadi permasalahan yang relevan dalam pembangunan Indonesia.

Sehingga diperlukan analisis empiris yang lebih komprehensif untuk mengkaji keterkaitan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara kondisi ekonomi dan stabilitas sosial pada tingkat regional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang berhubungan dengan tingkat kriminalitas, khususnya tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Ketimpangan Pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai variabel kontrol, sehingga hubungan antara variabel independen dan kriminalitas dapat diestimasi secara lebih akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kriminalitas di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Pendapatan secara simultan terhadap Kriminalitas di Indonesia dengan mengendalikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai variabel kontrol?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan membuktikan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kriminalitas di Indonesia.
2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Indonesia.
3. Menganalisis dan membuktikan pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Pendapatan secara simultan terhadap Kriminalitas di Indonesia dengan mengendalikan Rata-rata Lama Sekolah sebagai variabel kontrol.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (Akademis): Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas literatur ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, dengan mengaitkan dinamika pasar tenaga kerja serta distribusi pendapatan terhadap kriminalitas. Hasilnya dapat memperkuat pandangan bahwa fenomena sosial berakar dari struktur ekonomi wilayah. Selain itu, studi ini memberikan pengalaman empiris bagi pendekatan ekonomi kriminalitas (*economic approach to crime*) di Indonesia, yang memandang perilaku kriminal sebagai keputusan rasional akibat tekanan ekonomi dan ketimpangan sumber daya.

2. Manfaat Praktis (Kebijakan): Hasil penelitian ini memberikan landasan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mengintegrasikan sektor ekonomi dan sosial. Temuan ini mendorong pemerintah untuk beralih dari pendekatan represif ke strategi preventif melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai faktor pendukung dalam menekan tingkat kriminalitas. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan melalui pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

